

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu konsep yang saat ini sedang menjadi mainstream adalah konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka mewujudkan *good governance* dilingkungan pemerintah daerah, pemerintah seharusnya melakukan reformasi dalam segala aspek pengelolaan daerah. Dimensi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara transparan, akuntabilitas dan partisipasi (*good governance*) serta didukung dengan adanya gaya kepemimpinan yang bagus (Mardiasmo, 2012). Dengan adanya *good governance*, salah satu manfaat yang bisa dipetik adalah meningkatkan kinerja melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan kepada publik.

Menurut Trisnaningsih (2012), diterapkan *good governance* diharapkan akan memberi arahan yang jelas pada perilaku kinerja serta etika profesional organisasi, upaya ini dimaksud agar kiprah maupun produk jasa yang dihasilkan akan lebih aktual dan terpercaya. Untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dan optimal, Amelia (2014) menyatakan *good governance* mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja pemerintah. Kemudian Trisnaningsih (2012) menyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor, melainkan berpengaruh tidak langsung melalui independensi auditor.

Sejak reformasi, sistem pemerintahan yang awalnya bersifat terpusat mulai mengalami desentralisasi. Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan maupun potensi sumber daya yang dimiliki sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan suatu daerah. Namun, di sisi lain luasnya wewenang serta besarnya dana yang dikelola dapat menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti kecurangan, kolusi, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan penerapan sistem pengendalian internal yang memadai dalam organisasi di sektor pemerintahan supaya dapat menekan atau memperkecil terjadinya penyelewengan (Rusnindita, 2017).

Keberadaan dan implementasi sistem pengendalian internal memiliki peranan penting dalam mendeteksi dan mencegah kecenderungan terjadinya kecurangan pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat diketahui dalam hasil survei dari KPMG New Zealand Forensic (2012), menyebutkan bahwa penerapan pengendalian internal yang buruk serta adanya kelemahan dan penyelewengan pada pengendalian internal merupakan dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecurangan.

Penyelenggaraan kegiatan atau program pada suatu instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan atau program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem inilah

yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Oleh karena itu, dalam menjamin layanan yang diberikan kepada publik telah sesuai dengan rencana, diperlukan media tertentu dan salah satu media yang dipandang relevan adalah SPIP. Selain itu, adanya *good governance* dalam menunjang SPIP yang berkualitas sangat dibutuhkan Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya - manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang mampu melaksanakan praktik *good governance* yaitu adanya fungsi audit internal. Sesuai dengan penjelasan Mardiasmo (2012) bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), terdapat tiga aspek, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Keberadaan audit internal untuk menjalankan fungsi pemeriksaan dapat mendorong terciptanya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk membangun pengendalian. Pengendalian internal dapat membantu pemerintah untuk meminimalisasi terjadinya kelemahan, kesalahan dan resiko kecurangan. Perancangan

pengendalian internal di setiap lingkungan instansi pemerintah diharapkan nantinya mampu memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasi, kehandalan pertanggungjawaban, dan kepatuhan terhadap hukum sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud.

Hal ini dilakukan untuk mengukur kembali seberapa besar tingkat signifikansi faktor-faktor yang mempengaruhi good governance memberikan tingkat kepercayaan atas penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah pada sampel penelitian yang mengambil tempat pada Kantor Inspektorat Kota Palopo sedangkan penelitian terdahulu menggunakan sampel pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pelalawan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengembangan beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wafa (2020) menghasilkan penelitian bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Implementasi Good Governance Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Pelalawan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Nofianty dan Denziana (2017), Sari (2013) dan Habibie (2013) yang mengatakan bahwa sistem pengendalian intern (SPI) berpengaruh terhadap penerapan good governance. Penelitian berbeda dilakukan oleh Efendy (2015) yang menunjukkan bahwa pengawasan fungsional daerah (Bawasda) dan pengendalian intern (internal control) tidak berpengaruh positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang telah dikemukakan diatas masih memiliki keterbatasan yang dapat pula dijadikan *research gap* dalam penelitian ini. Ferdinand (2011) menyatakan bahwa *research gap* adalah celah-celah atau senjang penelitian yang dapat dimasuki oleh seorang peneliti berdasarkan pengalaman atau penemuan-penemuan penelitian terdahulu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengaruh sistem pengendalian internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Palopo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu: bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Palopo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Palopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan sesuatu yang diharapkan ketika sebuah penelitian sudah selesai. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini akan memberikan tambahan pengetahuan dalam bidang akuntansi manajemen terkait dengan pengaruh sistem pengendalian internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Tindakan korupsi, penggelapan dan manipulasi laporan yang saat ini marak terjadi harus dieliminasi sehingga organisasi tidak mengalami kerugian besar. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menunjukkan bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk melakukan langkah-langkah untuk menghindarkan dari terjadinya tindak kecurangan. Selain itu, dapat dijadikan bahan evaluasi tentang pengelolaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang saat ini sedang terjadi pada Pemerintah Kota Palopo.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini, yaitu:

1. Sistem pengendalian internal yang dibatasi pada pengertian dan prinsip pengendalian internal.
2. Tata kelola pemerintahan yang baik yang dibatasi pada pengertian, prinsip-prinsip, tujuan dan manfaat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Pustaka Sistem Pengendalian Internal

2.1.1 Pengertian Pengendalian Internal

Dijelaskan oleh Mahmudi (2010: 20) bahwa sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang baik adalah sistem akuntansi yang di dalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai. Pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi dalam melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2.1.2 Tujuan Pengendalian Internal

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan penyelenggaraan tersebut adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif, sedangkan tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern menurut Mahmudi (2010:20) adalah :

1. Untuk melindungi aset (termasuk data) negara
2. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
4. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
5. Untuk efisiensi dan efektifitas operasi
6. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.3 Unsur-Unsur Pengendalian Internal

Menurut PP No 60 tahun 2008 bahwa SPIP terdiri atas unsur:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi; dan
5. Pemantauan pengendalian intern.

Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

1. Lingkungan Pengendalian

Pada PP No. 60 tahun 2008 pasal 4 dijelaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM

2. Penilaian Risiko

Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah dapat menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko ini terdiri atas:

- a. Penetapan tujuan instansi secara keseluruhan
 - b. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan
 - c. Identifikasi risiko
 - d. Analisis risiko
 - e. Mengelola risiko selama perubahan
3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat, tugas dan fungsi yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian sebagaimana yang dimaksud pada PP NO. 60 tahun 2008 pasal 18 ayat (3) terdiri atas:

- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. Pemisahan fungsi;
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Menurut Mahmudi (2010:22) Komponen penting yang terkait dengan sistem pengendalian internal khususnya kegiatan pengendalian antara lain:

- a. Sistem dan prosedur akuntansi
 - b. Otorisasi
 - c. Formulir, dokumen dan catatan
 - d. Pemisahan tugas
4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya :

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.
5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

2.1.4 Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Internal

Menurut Aribowo (2014) peran dan tanggung jawab orang-orang dalam organisasi terhadap SPIP adalah:

1. Manajemen

Dalam hal ini adalah Menteri/Pimpinan, lembaga, Gubernur, dan bupati/walikota serta jajaran manajemen di lingkungannya. Para pimpinan inilah yang paling bertanggungjawab menyelenggarakan SPIP dilingkungan kerjanya. Disamping itu pimpinan memegang peranan penting dalam penerapan SPIP yang memerlukan keteladanan dari pimpinan yang mempengaruhi integritas, etika dan faktor lainnya dari lingkungan pengendalian yang positif.

2. Seluruh pegawai

SPIP dengan berbagai tingkatan, menjadi tanggungjawab semua pegawai dalam suatu instansi dan seharusnya ada dalam uraian pekerjaan setiap pegawai. Setiap pegawai menghasilkan informasi yang digunakan dalam sistem pengendalian intern atau melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk mempengaruhi pengendalian.

Setiap pegawai juga harus bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah dalam pelaksanaan kegiatan instansi, ketidakpatuhan terhadap aturan perilaku, serta pelanggaran kebijakan atau tindakan-tindakan yang illegal lainnya.

3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang penting untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SPIP, dan memberikan kontribusi terhadap efektivitas SPIP yang sedang berlangsung. Karena posisi organisasi

APIP independen dari manajemen serta otoritas yang disandangnya, APIP sering berperan dalam fungsi pemantauan.

4. Auditor Eksternal dan Pihak Luar Instansi

Sejumlah pihak luar sering memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan instansi. Auditor eksternal membawa pandangan yang objektif dan independen, mengkontribusikan langsung melalui pernyataan audit atas laporan keuangan dan tidak langsung menyediakan informasi penting untuk manajemen dalam menjalankan tanggung jawabnya termasuk sistem pengendalian intern.

Pihak lain yang juga memberikan pengaruh kepada instansi adalah legislator, regulator dan stakeholders lainnya yaitu pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait dengan instansi. Namun pihak luar tidak bertanggung jawab atau tidak menjadi bagian dalam sistem pengendalian intern.

2.1.5 Keterbatasan Pengendalian Internal

Menurut Tugiman (2011:9) menyatakan bahwa permasalahan pengendalian yang merupakan keterbatasan, antara lain:

1. Banyak pengendalian yang ditetapkan memiliki tujuan yang tidak jelas.
2. Pengendalian lebih diartikan sebagai tujuan akhir yang harus dicapai bukan sebagai atau sasaran untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Pengendalian ditetapkan terlalu berlebihan (*over controlling*) tanpa memperhatikan sisi manfaat dan biayanya.
4. Penerapan yang tidak tepat dari pengendalian juga mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya inisiatif dan kreatifitas setiap orang.
5. Pengendalian tidak memperhitungkan aspek perilaku (*behavioral*) padahal faktor manusia merupakan kunci utama untuk berhasilnya suatu pengendalian.

2.1.6 Efektivitas Pengendalian Internal

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan atau program yang dikaitkan dengan tujuan yang ditetapkan. Suatu pengendalian internal dikatakan efektif bila memahami tingkat sejauh mana tujuan operasi entitas tercapai, laporan keuangan yang diterbitkan dipersiapkan secara handal, hukum, dan regulasi yang berlaku dipatuhi.

Menurut Mardiasmo (2012: 134) pengertian efektivitas adalah sebagai berikut: “Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar daripada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan pengertian diatas jika dikaitkan dengan penerapan pengendalian internal dapat dikatakan bahwa tercapainya tujuan suatu organisasi ditetapkan oleh pihak manajemen melalui penerapan sistem pengendalian internal.

Tujuan sistem pengendalian internal pemerintah sendiri memiliki tujuan untuk mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlindungan aset negara, keterlaksanaan laporan keuangan, dan kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku.

2.2 Telaah Pustaka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

2.2.1 Pengertian *good governance*

Padanan kata *governance* dalam bahasa Indonesia adalah penadbiran, yang berarti pemerintahan, pengelolaan (Billah, 2011). Dasar kata penadbiran adalah tadbir, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) berarti perihal mengurus atau mengatur (memimpin/mengelola), pemerintahan, dan administrasi. Sedangkan penadbir berarti pengurus atau pengelola. Kata *government* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pemerintah, dengan demikian sama maknanya dengan penadbir (Sedarmayanti, 2014: 273).

Governance lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut. Sedangkan arti *good* dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung pemahaman:

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
2. Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan (Sedarmayanti, 2014: 274).
3. Pemerintahan (*governance*) sebagaimana dikemukakan oleh Kooiman (2013) adalah *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Secara umum, *governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, private sectors (sektor swasta/dunia usaha), dan society (masyarakat). Oleh sebab itu, *good governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholders terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (Sedarmayanti, 2014: 2).

Sedangkan OECD dan World Bank mengartikan *good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menjalankan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan (Sedarmayanti, 2014: 273).

2.2.2 Aktor-aktor *Good Governance*

Aktor-aktor *good governance* menurut Sedarmayanti (2014: 280), antara lain:

1. Negara/pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, pemerintah dan dinas-dinas yang berkaitan seperti dinas pendidikan. Negara sebagai salah satu unsur *governance*, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor

publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.

2. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri pengolahan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal. Dalam bidang pendidikan, sektor swasta meliputi yayasan-yayasan yang mengelola sekolah swasta.
3. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan ada yang dinamakan Dewan Pendidikan yang merupakan lembaga *independent* yang memiliki posisi sejajar dengan Bupati/ Walikota dan DPRD.

Good governance memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor di atas. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas *good governance*, ada yang disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan kepada daerah, masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada di masyarakat. Artinya saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta pun berkesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

2.2.3 Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Kepemerintahan yang baik menurut UNDP (2012) mengidentifikasi lima karakteristik yaitu:

1. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, dan politik.
2. Komunikasi, terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil.
3. Proses penguatan sendiri, adalah kunci keberadaan dan kelangsungan keteraturan dari berbagai situasi kekacauan yang disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakkan kemandirian masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek pemerintahan yang baik.
4. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang menghasilkan persatuan, harmoni, dan kerja sama untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani.
5. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, kekuatan pasar, dan masyarakat madani.

Lima karakteristik dalam *good governance* mencerminkan terjadinya proses pengambilan keputusan yang melibatkan stakeholders dengan menerapkan prinsip *good governance* yaitu partisipasi, transparansi, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi dan misi. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2013) mengungkapkan prinsip-prinsip

good governance antara lain yaitu akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing. Mustopadidjaja (2012) mengatakan prinsip-prinsip *good governance* adalah demokrasi dan pemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, dan konsistensi kebijakan dan kepastian hukum.

Jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi (Sedarmayanti, 2014:289).

2.2.4 Kendala Mewujudkan *Good Governance*

Upaya perbaikan sistem birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas dalam mencari solusi perbaikan. Demikian pula masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktik KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut belum sepenuhnya teratasi, baik dari sisi internal maupun eksternal (Sedarmayanti, 2014:310).

Dari sisi internal, faktor demokrasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip tata pemerintahan

yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja publik serta taat hukum. Secara khusus dari sisi internal birokrasi, berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi, antara lain pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan, dan banyaknya praktik KKN. Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (e-government) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat (Sedarmayanti, 2014: 310).

Selain itu, problem demokrasi dari segi lembaga dan perilaku individu masih muncul. Rakyat masih belum merasa terwakili oleh keberadaan wakilnya di DPR(D) karena partisipasinya hanya pada saat pemilu, setelah itu rakyat ditinggal dalam proses pengambilan kebijakan. Rendahnya partisipasi dalam masyarakat mengurangi tingkat legitimasi pemerintah sehingga munculnya pemerintahan yang kuat ditingkat lokal maupun pusat masih dalam cita-cita (Sedarmayanti, 2014: 311).

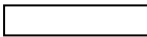
2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan untuk mengidentifikasi variabel yang akan diteliti, yaitu variabel sistem pengendalian internal (X) dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Y). Variabel tersebut digambarkan dalam kerangka konsep sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

 : Variabel Independen

 : Variabel Dependen

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian	Metode Analisis/Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Juniarto. 2020. Pengaruh atas pengendalian internal dalam budaya organisasi dan Proses mewujudkan good corporate governance.	Variabel dalam penelitian ini adalah good corporate governance (terikat) dan pengendalian internal (variabel bebas). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana.	Berdasarkan hasil pengolahan data dan dilakukannya uji hipotesa mengatakan bahwa pengendalian internal tidak memiliki pengaruh dalam menentukan good corporate governance, sedangkan budaya organisasi memiliki pengaruh dalam menentukan dan mewujudkan good corporate governance

			dalam perusahaan atau organisasi yang ada,
2.	Purnamasari. 2020. Fungsi audit internal dan pengendalian internal dalam pelaksanaan good corporate governance (studi pada perusahaan spbu di kota malang).	Variabel dalam penelitian ini adalah good corporate governance (terikat) dan audit internal, pengendalian internal (variabel bebas). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.	Berdasarkan temuan bab sebelumnya, hasil auditor internal dan kontrol internal secara simultan dapat mempengaruhi penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Sebagian, variabel auditor internal memiliki efek positif pada praktik tata kelola perusahaan yang baik. Variabel kontrol internal secara parsial mempengaruhi penegakan tata kelola perusahaan yang baik
3.	Wafa. 2020. Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian intern pemerintah (spip) terhadap penerapan good governance (studi empiris pada pemerintah desa di kabupaten pelalawan).	Variabel dalam penelitian ini adalah penerapan good governance (terikat) dan kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian intern pemerintah (variabel bebas). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana berganda.	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah, Partisipasi Masyarakat dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Implementasi Good Governance.
4.	Nurhayati. 2016. Pengaruh pengendalian internal terhadap Penerapan good governance pada satuan Kerja pengembangan air minum Dan sanitasi provinsi aceh.	Variabel dalam penelitian ini adalah good governance (terikat) dan pengendalian internal (variabel bebas). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penendalian Intern berpengaruh positif terhadap Penerapan Good Cooperate Governance Pada Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Aceh. Hasil uji- t menunjukkan bahwa Hasil uji thitung = 2.138 > tabel (2.00488) dengan tingkat signifikan

			0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05
5.	Mailoor. 2017. Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Kepulauan Talaud).	Variabel dalam penelitian ini adalah Penerapan Good Governance (terikat) dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (variabel bebas). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan <i>good governance</i> , dimana nilai $t= 4,342$ dan nilai signifikan 0,000; (2) Budaya organisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penerapan <i>good governance</i> , dimana nilai $t= -1,019$ dan nilai signifikan 0,310; (3) Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan <i>good governance</i> , dimana nilai $t= 2,458$ dan nilai signifikan 0,015; (4) Peran APIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan <i>good governance</i> , dimana nilai $t= 6,647$ dan nilai signifikan 0,000; (5) Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan <i>good governance</i> , dimana nilai $t= 2,128$ dan nilai signifikan 0,035.
6.	Prabawa. 2020. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten	Variabel dalam penelitian ini adalah penerapan good governance (terikat) dan Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya mewujudkan good

	Minahasa).	Daerah (variabel bebas). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana berganda.	governance. 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ada yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap upaya mewujudkan good governance
7.	Jalius. 2017. pengaruh sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi terhadap penerapan good government governance (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru).	Variabel dalam penelitian ini adalah good government governance (terikat) dan sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan komitmen organisasi (variabel bebas). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.	Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem pengendalian intern, pengelolaan keuangan daerah dan manajemen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan good government governance dengan signifikan <0,05.

2.5 Hipotesis

Hipotesis dalam suatu penelitian adalah jawaban sementara tentang hubungan antar variabel penelitian (Dharma, 2011). Hipotesis dalam penelitian bisa digunakan sebagai dasar masalah maupun tujuan penelitiannya. Dalam sebuah masalah ataupun tujuan penelitiannya bisa nampak apakah penelitian tersebut menggunakan sebuah hipotesis ataupun tidak.

Salah satu hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia adalah tidak adanya sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal menyebabkan lemahnya SPIP. Untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan implementasi dalam membentuk struktur pengendalian internal yang memadai berkaitan dengan penyediaan data yang akurat.

Hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: diduga bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah metode yang digunakan peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang memberikan arah terhadap jalannya penelitian (Dharma, 2011). Desain penelitian yang digunakan adalah desain kuantitatif. Penelitian kuantitatif memusatkan pada pengumpulan data yang berupa angka-angka untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan alat-alat analisis kuantitatif maupun dengan perhitungan matematika.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kota Palopo yang beralamat di Jl. Andi Mas Jaya, Kelurahan Boting Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2020.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan sumber data yang diperlukan dalam suatu penelitian (Saryono, 2013). Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai di Kantor Inspektorat Kota Palopo sebanyak 35 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti (Hidayat, 2013). Sampel dalam penelitian ini yaitu pegawai di Kantor Inspektorat Kota Palopo sebanyak 35 orang, yang diambil menggunakan sampling jenuh yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yang ada.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka-angka yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Data ini berupa angka yang diperoleh dari Kantor Inspektorat Kota Palopo seperti jumlah pegawai dan data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan instrumen berupa kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang dilengkapi dengan alternatif jawaban yang tersedia dalam bentuk angket kepada responden, menggunakan Skala Likert dengan pilihan Sangat Setuju (Skor 5), Setuju (skor 4), Kurang Setuju (skor 3), Tidak Setuju (skor 2) dan Sangat Tidak Setuju (skor 1).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi lapangan, dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan menyebarkan daftar pertanyaan yang dilengkapi dengan alternatif jawaban yang tersedia dalam bentuk angket kepada responden.
2. Penelitian kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian. Kegunaan penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh dasar-dasar teori yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis masalah yang diteliti, sebagai pedoman untuk melakukan studi dan penelitian di lapangan.

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel independen: Sistem pengendalian internal (X), yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Hal tersebut akan dilakukan di Kantor Inspektorat Kota Palopo.
2. Variabel dependen: Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Y) yaitu penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien. Hal tersebut akan dilakukan di Kantor Inspektorat Kota Palopo.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pertanyaan tertutup (kuesioner), dengan terlebih dahulu melakukan pengujian dengan uji validitas dan reliabilitas.

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Langkah selanjutnya adalah secara statistik, angka korelasi yang diperoleh dengan melihat tanda bintang pada hasil skor total, atau membandingkan dengan angka bebas korelasi nilai r yang menunjukkan valid. Pada penelitian ini uji validitas akan dilakukan dengan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*). Untuk menentukan nomor-nomor item yang valid dan yang gugur, perlu dikonsultasikan dengan tabel r product moment. Kriteria penilaian uji validitas adalah :

1. Apabila r hitung $>$ r tabel, maka item kuesioner tersebut valid.
2. Apabila r hitung $<$ r tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner tidak valid.

3.7.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Adapun cara yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach 0,60. Untuk mengetahui kuesioner tersebut sudah reliabel akan

dilakukan pengujian reliabilitas kuesioner dengan bantuan komputer program SPSS.

3.8 Analisis Data

3.8.1 Metode Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan cara menguraikan dan menafsirkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan. Analisis deskriptif dilakukan peneliti yaitu dengan mendistribusikan jawaban responden dalam bentuk tabel sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang distribusi jawaban responden.

3.8.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif. Dimana untuk mencapai tujuan pertama yaitu menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana berguna dilakukan terhadap model satu variabel bebas, untuk diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat (Santoso, 2010). Regresi linear sederhana dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, sedangkan yang menjadi variabel bebas adalah sistem pengendalian internal. Model hubungan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y = Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Sistem pengendalian internal

e = Variabel pengganggu (Standard error)

3.8.3 Koefisien determinasi

Koefisien determinasi pada regresi linier sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Secara sederhana koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan Koefisien Korelasi (R).

3.8.4 Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Analisis uji t juga dilihat dari tabel "*Coefficient*".

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Palopo

1. Secara geografis

Kota Palopo merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu. Secara Geografis Kota Palopo kurang lebih 375 km dari Kota Makassar ke arah Utara dengan posisi antara 120 derajat 03 sampai dengan 120 derajat 17,3 Bujur Timur dan 2 derajat 53,13 sampai dengan 3 derajat 4 Lintang Selatan, pada ketinggian 0 sampai 300 meter di atas permukaan laut. Kota Palopo di bagian sisi sebelah Timur memanjang dari Utara ke Selatan merupakan daratan rendah atau kawasan pantai seluas kurang lebih 30% dari total keseluruhan, sedangkan lainnya bergunung dan berbukit di bagian Barat, memanjang dari Utara ke Selatan, dengan ketinggian maksimum adalah 1000 meter di atas permukaan laut.

Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walendrang Kabupaten Luwu
- b. Sebelah Timur dengan Teluk Bone
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja.

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,39% dari luas wilayah propinsi Sulawesi Selatan.

2. Administrasi Pemerintahan

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 258,52 km² atau seluas 0,39% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Jumlah penduduk Kota Palopo pada tahun 2016 sebesar 172.916 jiwa yang terdiri dari 84.192 jiwa penduduk laki-laki dan 88.724 jiwa penduduk perempuan.

3. Keadaan Topografi dan Iklim

Wilayah Kota Palopo sebagian besar merupakan daratan rendah dengan keberadaannya di wilayah pesisir pantai. Sekitar 62,85% dari total luas daerah Kota Palopo, menunjukkan bahwa yang merupakan daerah dengan ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut, sekitar 24,76% terletak pada ketinggian 501-1000 meter di atas ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Kota Palopo secara spesifik dipengaruhi oleh adanya iklim tropis basah dengan keadaan curah hujan bervariasi antara 500-1000 mm/ tahun sedangkan untuk daerah hulu sungai di bagian pegunungan berkisar antara 1000-2000 mm/ tahun. Suhu udara berkisar antara 25,5°C - 29,7°C.

4.1.2 Karakteristik Responden

Pada penelitian yang dilakukan selama kurang lebih dua bulan, penelitian memperoleh data dari responden yang telah diberikan lembar kuesioner oleh peneliti. Kuesioner yang disebar sebanyak 35 kuesioner dan terisi semua. Adapun data tersebut dijelaskan pada tabel berikut ini:

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia yaitu menguraikan atau menggambarkan usia responden. Hal ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu: usia 31-40 tahun dan usia > 40 tahun. Adapun karakteristik responden menurut usia dapat disajikan melalui tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	31-40 tahun	14	40
2	> 40 tahun	21	60
Jumlah		35	100

Sumber : data diolah (2020)

Berdasarkan data pada tabel 4.1 tentang karakteristik responden berdasarkan usia, dapat kita ketahui bahwa jumlah responden yang berusia antara 31-40 tahun yaitu sebanyak 14 orang atau sekitar 40% dari seluruh jumlah responden dan responden yang berusia > 40 tahun yaitu sebanyak 21 orang atau sekitar 60% dari seluruh jumlah responden.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin yaitu menguraikan atau menggambarkan jenis kelamin responden. Hal ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu: laki-laki dan perempuan. Adapun karakteristik responden menurut jenis kelamin dapat disajikan melalui tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	12	34,3
2	Perempuan	23	65,7
Jumlah		35	100

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan data pada tabel 4.2 tentang karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, dapat kita ketahui bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 12 orang atau sekitar 34,3% dari seluruh jumlah responden. Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 23 orang atau sekitar 65,7% dari seluruh jumlah responden.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan menguraikan atau menggambarkan tingkat pendidikan terakhir responden. Hal ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu: SMA, Diploma dan Sarjana. Adapun karakteristik responden menurut tingkat pendidikan terakhir dapat disajikan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SMA	0	0
2	Diploma	0	0
3	Sarjana	35	100
Jumlah		35	100

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan data pada tabel 4.3 tentang karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, dapat kita ketahui bahwa jumlah semua responden berpendidikan terakhir sarjana.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kerja

Karakteristik responden berdasarkan lama kerja menguraikan atau menggambarkan lamanya kerja responden di pegadaian. Hal ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu: < 5 tahun, 5-10 tahun dan > 10 tahun.

Adapun karakteristik responden menurut lama kerja dapat disajikan melalui tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kerja

No	Lama Kerja	Jumlah	Persentase (%)
1	< 5 tahun	6	17,1
2	5-10 tahun	19	54,3
3	> 10 tahun	10	28,6
Jumlah		35	100

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan data pada tabel 4.4 tentang karakteristik responden berdasarkan lama kerja, dapat kita ketahui bahwa jumlah responden yang lama kerja < 5 tahun yaitu sebanyak 6 orang atau sekitar 17,1% dari seluruh jumlah responden, responden yang lama kerja 5-10 tahun yaitu 19 orang atau sekitar 54,3% dari seluruh jumlah responden dan responden yang lama kerja > 10 tahun yaitu sebanyak 10 orang atau sekitar 28,6% dari seluruh jumlah responden.

4.1.3 Analisa Data

1. Analisis Deskriptif

Sebaran jawaban responden terhadap variabel sistem pengendalian internal (X) dan tata kelola pemerintahan yang baik (Y) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

a. Sistem pengendalian internal (X)

Tabel 4.5 Sebaran jawaban responden system pengendalian internal

No	Pernyataan	TS (1)	KS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Pimpinan selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern	0	0	0	17	18
2	Kantor kami telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi	0	0	0	18	17
3	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap	0	0	0	19	16

	kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi.					
4	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.	0	0	0	18	17
5	Kebijakan maupun prosedur pengamanan fisik atas asset telah ditetapkan dengan baik dan pengeluaran uang pada kantor kami selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas	0	0	0	28	7
6	Instansi Pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi maupun pengamanan atas asset infrastruktur dan semua transaksi yang diproses kedalam komputer adalah transaksi yang telah diotorisasi	0	0	0	25	10
7	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif	0	0	0	21	14
8	Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing bagian di kantor kami telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya	0	0	0	22	13
9	Kantor kami selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/reviu maupun saran yang diberikan dan sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern dan melakukan perbaikan pengendalian intern	0	0	0	21	14
10	Pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan.	0	0	0	17	18

b. Tata kelola pemerintahan yang baik (Y)

Tabel 4.6 Sebaran jawaban responden tata kelola pemerintahan yang baik

No	Pernyataan	TS (1)	KS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Instansi tempat saya bekerja sudah menyelenggarakan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik)	0	0	0	17	18
2	Tidak adanya keterbukaan pemerintah daerah akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik	0	0	0	27	8
3	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi telah dipublikasikan secara bebas dapat diakses	0	0	0	24	11

	oleh masyarakat luas					
4	Informasi yang tersedia dapat dimengerti merupakan perwujudan nyata dari transparansi pemerintah	0	0	0	19	16
5	Pertanggungjawaban instansi ini dilaksanakan secara periodik melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)	0	0	0	23	12
6	Pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas setiap aktivitas akan membangun good governance	0	0	0	23	12
7	Kinerja instansi tempat saya bekerja menggunakan prinsip efisiensi	0	0	0	16	19
8	Saya memahami pengelolaan sumber daya publik harus dilakukan secara ekonomis agar menciptakan good governance	0	0	0	19	16
9	Keuangan dari instansi ini dikelola secara efektif dan efisien	0	0	0	20	15
10	Pemeliharaan fasilitas publik sudah dikelola secara efektif	0	0	0	25	10

2. Uji Validitas

Adapun uji validitas mengetahui besarnya hubungan antara item butir pernyataan dengan total item pernyataan untuk masing-masing variabel yaitu sistem pengendalian internal (X) dan tata kelola pemerintahan yang baik (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Uji validitas variabel sistem pengendalian internal

Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
SPI1	0,498	0,282	Valid
SPI2	0,296	0,282	Valid
SPI3	0,405	0,282	Valid
SPI4	0,551	0,282	Valid
SPI5	0,474	0,282	Valid
SPI6	0,383	0,282	Valid
SPI7	0,469	0,282	Valid
SPI8	0,581	0,282	Valid
SPI9	0,494	0,282	Valid
SPI10	0,623	0,282	Valid

Sumber: Data lampiran

Untuk mengukur nilai validitas sistem pengendalian internal (X) ditentukan dengan melihat nilai dengan jumlah responden yaitu 35 responden sehingga nilai pada Tabel Product Moment dan didapat nilai $r = 0,282$. Jika hasil validitas berada di atas 0,282 maka dianggap butir pernyataan atau instrumen sudah valid. Hasil analisis validitas untuk semua Instrumen pada variabel sistem pengendalian internal (X) pada tabel 4.7, hasil analisisnya diatas $r = 0,282$ sehingga dapat disimpulkan bahwa 10 skor pernyataan atau instrumen pada variabel sistem pengendalian internal (X) tersebut dinyatakan valid dan sudah layak untuk dijadikan pengukuran variabel penelitian.

Tabel 4.8 Uji validitas variabel tata kelola pemerintahan yang baik

Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
TK1	0,472	0,282	Valid
TK2	0,626	0,282	Valid
TK3	0,409	0,282	Valid
TK4	0,545	0,282	Valid
TK5	0,536	0,282	Valid
TK6	0,563	0,282	Valid
TK7	0,399	0,282	Valid
TK8	0,367	0,282	Valid
TK9	0,367	0,282	Valid
TK10	0,446	0,282	Valid

Sumber: Data lampiran

Untuk mengukur nilai validitas tata kelola pemerintahan yang baik (Y) ditentukan dengan melihat nilai dengan jumlah responden yaitu 35 responden sehingga nilai pada Tabel Product Moment dan didapat nilai $r = 0,282$. Jika hasil validitas berada di atas 0,282 maka dianggap butir pernyataan atau instrumen sudah valid. Hasil analisis validitas untuk semua Instrumen pada variabel tata kelola pemerintahan yang baik (Y) pada tabel 4.8, hasil analisisnya diatas $r = 0,282$ sehingga dapat disimpulkan bahwa 10 skor pernyataan atau instrumen pada

variabel tata kelola pemerintahan yang baik (Y) tersebut dinyatakan valid dan sudah layak untuk dijadikan pengukuran variabel penelitian.

3. Uji Reliabilitas

Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pernyataan berbentuk kuesioner.

Tabel 4.9 Uji reliabilitas

Variabel	r Alpha	Nilai reliabilitas	Keterangan
Sistem pengendalian internal	0,619	0,600	Reliabel
Tata kelola pemerintahan yang baik	0,608	0,600	Reliabel

Sumber: Data lampiran

Cara Pengambilan Keputusan :

- a. Jika $r \text{ Alpha} > 0,600$ maka reliabel.
- b. Jika $r \text{ Alpha} < 0,600$ maka tidak reliabel.

Analisis: Tabel 4.9 menunjukkan hasil pengujian reliabilitas pada kuesioner dengan nilai *Cronbach's* Alpha atau r Alpha sebesar 0,619; 0,608. Hal ini membuktikan kuesioner adalah reliabel karena r Alpha yang bernilai lebih besar dari 0,600.

4. Hasil Model Estimasi

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dibuat suatu analisis yang merupakan hasil regresi linier sederhana. Model regresi linier sederhana menggambarkan pengaruh sistem pengendalian internal yang merupakan variabel independen

terhadap variabel dependen yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Model estimasi persamaannya adalah:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y = Tata kelola pemerintahan yang baik

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Variabel sistem pengendalian internal

e = Variabel pengganggu (Standard error)

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil dan telah diolah ke dalam model perhitungan komputer dengan menggunakan program SPSS 23 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10 Regresi linear sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.539	4.091		1.843	.074
	Sistem pengendalian internal	.825	.093	.840	8.903	.000

a. Dependent Variable: Tata kelola pemerintahan yang baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat dibuat hasil model estimasi sebagai berikut: $Y = 7,539 + 0,825 X$

Interpretasi model tersebut di atas, yaitu:

- a. Nilai a (konstanta) sebesar 7,539, artinya apabila tidak ada variabel sistem pengendalian internal (X) atau sama dengan nol maka tata kelola pemerintahan yang baik sebesar 7,539 satuan.

- b. Nilai koefisien sistem pengendalian internal (b) sebesar 0,825. Artinya, setiap ada kenaikan variabel sistem pengendalian internal (X) sebesar satu satuan maka akan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik sebesar 0,825 satuan.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil dan telah diolah ke dalam model perhitungan komputer dengan menggunakan program SPSS 23 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.11 Koefisien determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.840 ^a	.706	.697	1.255
a. Predictors: (Constant), Sistem pengendalian internal				

Dari tabel 4.11 di atas diperoleh nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,840. Artinya, hubungan antara variabel system pengendalian internal mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Palopo.

Koefisien determinasi sebesar 0,706 atau 70,6% yang berarti variabel sistem pengendalian internal mampu menjelaskan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik sebesar 70,6%, sedangkan sisanya sebesar 29,4% (100% - 70,6%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

6. Uji T-Statistik (Uji Parsial)

Berdasarkan hasil persamaan model estimasi dapat diketahui pengaruh variabel independen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mengetahui pengaruh nyata variabel secara parsial dapat dilakukan dengan uji t.

Tabel 4.12 Uji T

Model		Coefficients ^a	
		t	Sig.
1	(Constant)	1.843	.074
	Sistem pengendalian internal	8.903	.000

a. Dependent Variable: Tata kelola pemerintahan yang baik

Pada tabel 4.12 diketahui bahwa nilai t hitung sistem pengendalian internal adalah 8,903. Sedangkan untuk menentukan nilai t tabel pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel t yang sudah ada. Df adalah hasil pengurangan jumlah data dikurangi jumlah variabel penelitian ($35-2 = 33$). Nilai signifikan pada $\alpha=5\%$, sehingga taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Selanjutnya tentukan nilai t tabel dengan melihat tabel t. Pada penelitian ini nilai signifikansi 0,05 dan Df adalah 33, sehingga diperoleh nilai t tabel adalah 1,692.

Nilai t-hitung sistem pengendalian internal $>$ t-tabel ($8,903 > 1,692$), dengan demikian hipotesis diterima. Ini berarti bahwa variabel sistem pengendalian internal signifikan dan berpengaruh nyata terhadap variabel tata kelola pemerintahan yang baik dengan tingkat kepercayaan 95%.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t-hitung sistem pengendalian internal $>$ t-tabel ($8,903 > 1,692$), dengan demikian hipotesis diterima. Ini berarti bahwa variabel sistem pengendalian internal signifikan dan berpengaruh nyata terhadap variabel tata kelola pemerintahan yang baik pada Kantor Inspektorat Kota Palopo.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi implementasi Sistem Pengendalian Internal. Saifuddin (2011) menyatakan dukungan pemimpin merupakan refleksi sikap positif pimpinan dalam memberikan respon terhadap suatu objek yang dihadapi. Dukungan pimpinan sebagai komitmen dan dukungan pimpinan, baik secara moril maupun materiil yang memadai sangat diperlukan. Adanya dukungan pemimpin mampu membantu organisasi dalam menciptakan pengendalian yang efektif dengan cara memelihara komunikasi yang baik, memberikan dorongan-dorongan positif baik secara moril maupun materiil sehingga merasa aman dan nyaman secara psikologis dalam bekerja yang nantinya dapat berdampak pada kualitas sistem pengendalian intern yang optimal.

Secara teori tata kelola pemerintahan yang baik dikatakan menekankan pada proses pengelolaan pemerintahan dengan adanya stakeholders yang terlibat dalam bidang sosial, ekonomi dan juga politik serta ikut juga terlibat dalam pendayaan sumber daya yang ada, manusia atau pun keuangan yang dilaksanakan menurut keperluan masing-masing. Dalam upaya penerapan good governance yang baik, maka haruslah diimbangi dengan good government pula. Maksudnya disini, tidak hanya tata kelola pemerintahan saja yang harus ditekankan. Namun, pemerintah juga harus berlaku yang baik sebagai pelaku pengelolaan keuangan rakyat. Agar pemerintahan berjalan dengan baik, berdaya guna dan juga berhasil guna. Maka penerapan prinsip-prinsip dari good governance tersebut sangatlah penting dan juga harus diimbangi dengan good government yang baik pula.

Dalam upaya penerapan good governance yang baik bagi suatu organisasi publik, maka haruslah diimbangi dengan pengendalian interen yang baik pula yaitu memiliki kewenangan dan kualifikasi yang dibutuhkan secara efektif

merupakan tujuan dari dilaksanakannya pengujian pengendalian intern (Wirda, 2013). Pengendalian Intern meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu organisasi untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong di taatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan.

Dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern yang selanjutnya disebut dengan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai berikut: “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Maksud dari kegiatan yang efektif dan efisien disini adalah aktifitas pemerintahan yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat berupa kegiatan dan kelembagaan yang diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni efektifitas dan efisien.

Keandalan pelaporan keuangan dibutuhkan untuk tanggungjawab (akuntabilitas) pemerintah dalam penggunaan dana masyarakat. Realisasi dana masyarakat ini harus disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap transparansi penggunaan anggaran daerah. Dengan adanya transparansi maka masyarakat ikut serta

memantau pengamanan asset Negara dari kemungkinan penyalahgunaan dari pihak internal pemerintah. Prinsip aturan hukum dalam tata kelola pemerintahan yang baik menghendaki adanya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat melindungi hak asasi manusia terutama kelompok minoritas (Ruspina, 2013). Jadi dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian intern di Kota Palopo sudah cukup optimal dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurhayati (2016) yang menunjukkan bahwa pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Penerapan Good Cooperate Governance Pada Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Aceh. Hasil uji- t menunjukkan bahwa Hasil uji thitung = 2.138 > tabel (2.00488) dengan tingkat signifikan 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Disamping itu, hasil uji R pada Model Summary menunjukkan sebesar (R square) : 0.078 yaitu 8%, yaitu dibatas 50 %, jadi pengaruhnya positif dan relatif kuat (relative kuat).

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka disimpulkan sebagai berikut: terdapat pengaruh sistem pengendalian internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Palopo, nilai t-hitung sistem pengendalian internal $>$ t-tabel ($8,903 > 1,692$).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka disarankan:

1. Disarankan kepada Kantor Inspektorat Kota Palopo untuk mempertahankan dan meningkatkan good government dengan meningkat fungsi internal control seperti jangan ada lagi kerja rangkap, menempatkan personil sesuai dengan keahliannya dan meningkatkan pengawasan melakat terhadap bawahan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan penelitian ini guna mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tata kelola pemerintahan yang baik.